

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik tata ruang dalam pengaturan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Palembang. Sebagai bagian penting dalam perencanaan tata ruang perkotaan, pengaturan lahan TPU sering kali menghadapi tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan lahan, pertumbuhan jumlah penduduk, dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan TPU di Kota Palembang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan regulasi perencanaan, tetapi juga oleh dinamika politik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Proses pengambilan keputusan dalam penataan lahan TPU sering kali terhambat oleh konflik kepentingan dan keterbatasan lahan, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan lahan yang memadai. Dalam konteks ini, politik tata ruang berperan penting dalam mengatur prioritas alokasi lahan dan penyediaan ruang publik yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih inklusif, agar pengaturan TPU di Kota Palembang dapat lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan jangka panjang.

Kata Kunci: Politik Tata Ruang, Tempat Pemakaman Umum, Pengaturan Lahan Tempat Pemakaman Umum

ABSTRACT

This research aims to analyze spatial politics in the arrangement of Public Cemetery (TPU) land in Palembang City. As an important part of urban spatial planning, TPU land arrangement often faces challenges related to land limitations, population growth, and other socio-economic interests. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and document studies related to regional policies and regulations. The results of the study indicate that TPU arrangements in Palembang City are not only influenced by technical factors and planning regulations, but also by political dynamics involving various actors, including local governments, communities, and the private sector. The decision-making process in TPU land arrangement is often hampered by conflicts of interest and land limitations, which cause an imbalance between community needs and adequate land availability. In this context, spatial politics plays an important role in setting priorities for land allocation and the provision of sustainable public space. This study recommends the need for increased coordination between government agencies and community participation in determining more inclusive spatial planning policies, so that TPU arrangements in Palembang City can be more optimal and responsive to long-term needs.

Keywords: Spatial Planning Policy, Public Cemetery, Land Management For Public Cemetery